

**PENGARUH TRANSFER KEUANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN
DESA DI KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG**

TESIS

**Disampaikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Ekonomi Pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Universitas Tanjungpura**



**ESAU LONDONG
NIM. B2052231004**

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2025**

PENGESAHAN TESIS





Tesis dengan judul: **Pengaruh Transfer Keuangan Terhadap Pembangunan Desa Di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang**

Ini diajukan oleh :

Nama : Esau Londong
NIM : B2052231004
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah
Tanggal Ujian : 10 Januari 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
Pembimbing 1	Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si NIP 19620525 198703 1 002	22/ Maret 25	
Pembimbing II	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si NIP 19631209 198903 1 004	22/ Maret 25	
Penguji 1	Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si. NIP 19720607 199803 2 001	21/ Maret 25	
Penguji II	Dr. H. Bustami, S.E., M.Si. NIP 19620612 198903 1 004	21/ Maret 25	

Pontianak, *Marat* 2025

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi



Dr. Erni Panda Kurniasih, SE, M.Si
NIP 197206071998032001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Daya Nasional – Imam Bonjol Pontianak 78124 Telp (0561) 571512, 571156, 743820 Fax (0561) 571512

Email : pascasarjanafcutan@gmail.com, website : www.pascasarjanafe.untan.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esau Londong
NIM : B2052231004
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah
Judul Tesis : Pengaruh Transfer Keuangan Terhadap Pembangunan Desa Di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang

Dengan ini menyatakan sebenarnya-benarnya bahwa seluruh isi tesis saya adalah murni hasil karya saya pribadi, tanpa menjiplak tulisan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata tulisan saya ini menjiplak tulisan karya orang lain, maka saya bersedia **digugurkan hak saya menyanggah gelar Magister Ekonomi**.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat saya,



(Esau Londong)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Daya Nasional – Imam Bonjol Pontianak 78124 Telp (0561) 571512, 571156, 743820 Fax (0561) 571512

Email : pascasarjanafeuntan@gmail.com, website : www.pascasarjanafe.untan.ac.id

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama : Esau Londong
NIM : B2052231004
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah
Judul Tesis : Pengaruh Transfer Keuangan Terhadap Pembangunan Desa Di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 22 Maret 2025



mat

Esau Londong
NIM. B2052231004

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah dalam proses penyelesaian tesis ini. Berkat kasih dan bimbingan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Tesis ini berjudul “Pengaruh Trasfer Keuangan Terhadap Pembangunan Desa Di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang” dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan ekonomi daerah.

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Prof. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura.
5. Bapak Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta arahan yang tulus dan penuh kesabaran selama proses penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si. dan Bapak Dr. H. Bustami, S.E., M.Si., selaku dosen penguji I dan II, yang telah memberikan saran, kritik, serta masukan berharga guna penyempurnaan tesis ini.

7. Almarhum kedua orang tua tercinta, yang telah mendidik dan membesarkan hingga Penulis bisa sampai pada saat ini.
8. Kedua Saudara beserta keluarga terkasih, yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan tanpa lelah, serta orang-orang yang mengasihi dan mendukung dalam perjalanan akademik ini.
9. Seluruh pengelola dan staf Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura.
10. Para dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, serta wawasan yang sangat berarti selama masa perkuliahan.
11. Rekan-rekan seperjuangan, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, serta berbagi pengalaman selama proses studi ini berlangsung.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan selama penyusunan tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dengan berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyajian materi maupun aspek teknis lainnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi langkah awal bagi penelitian selanjutnya di bidang terkait.

Pontianak, Maret 2025

Penulis

Esau Londong

PENGARUH TRANSFER KEUANGAN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN MARAU KABUPATEN KETAPANG

Esau Londong

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer keuangan terhadap pembangunan di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Data yang digunakan merupakan data sekunder dalam bentuk panel, terdiri dari 10 desa (*cross-section*) di Kecamatan Marau dan data tahunan selama 6 tahun (2019–2024) (*time series*). Analisis dilakukan menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM) dengan bantuan software Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Sedangkan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Restribusi tidak signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi optimalisasi pengelolaan transfer keuangan guna mendukung pembangunan desa di wilayah penelitian.

Kata kunci: Indeks Desa Membangun, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Restribusi

**THE EFFECT OF FINANCIAL TRANSFERS ON VILLAGE
DEVELOPMENT IN MARAU DISTRICT, KETAPANG REGENCY**

Esau Londong

Tanjungpura University, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of financial transfers on development in Marau District, Ketapang Regency. The data used is secondary panel data, consisting of 10 villages (cross-section) in Marau District and annual data over six years (2019–2024) (time series). The analysis is conducted using the Random Effect Model (REM) approach with the assistance of Eviews 9 software. The research findings indicate that Village Funds have a positive and significant impact on the Village Development Index in Marau District, Ketapang Regency. Meanwhile, the Village Fund Allocation, Revenue Sharing from Taxes, and Revenue Sharing from Retribution do not have a significant effect on the Village Development Index in Marau District, Ketapang Regency. These findings provide valuable insights for optimizing financial transfer management to support village development in the study area.

Keywords: *Village Development Index, Village Fund Allocation, Village Fund, Revenue Sharing from Taxes, Revenue Sharing from Retribution*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.2.1 Pernyataan Masalah	10
1.2.2 Pertanyaan Penelitian	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kontribusi Penelitian	12
1.4.1 Kontribusi Teoritis	12
1.4.2 Kontribusi Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Teori	13
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	13
2.1.2 Dana Transfer.....	14
2.1.3 Alokasi Dana Desa (ADD)	15
2.1.4 Dana Desa (DD).....	16
2.1.5 Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi).....	18
2.1.6 Indeks Desa Membangun (IDM)	18
2.2 Kajian Empiris.....	21
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian	22
2.3.1 Kerangka Konseptual	22
2.3.2 Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Bentuk Penelitian	24
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	24
3.4 Variabel Penelitian	24
3.5 Metode dan Alat Analisis	26
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	26
3.5.2 Regresi Linier Berganda	26
3.5.3 Estimasi Model	27
3.5.4 Uji Model	28
3.5.5 Pengujian Hipotesis.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian.....	30
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif	30
4.1.2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	37

4.1.3	Pengujian Hipotesis.....	41
4.2	Pembahasan	43
4.2.1	Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun .	43
4.2.2	Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun.....	46
4.2.3	Pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap Indeks Desa Membangun	50
4.2.4	Pengaruh Bagi Hasil Retribusi terhadap Indeks Desa Membangun	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN.....		64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Marau Tahun 2023	2
Tabel 1.2	Alokasi Dana Desa Kecamatan Marau Tahun 2023	5
Tabel 1.3	Dana Desa Kecamatan Marau Tahun 2023	7
Tabel 1.4	Bagi Hasil Pajak-Bagi Hasil Retribusi Desa Kecamatan Marau Tahun 2023	9
Tabel 3.1	Defenisi Operasional Variabel	25
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif	30
Tabel 4.2	Uji Chow.....	38
Tabel 4.3	Uji Hausman	38
Tabel 4.4	Uji Lagrange Multiplier.....	39
Tabel 4.5	Hasil Uji Regresi.....	39
Tabel 4.6	Hasil Uji t-Statistik.....	41
Tabel 4.7	Hasil Uji F-statistik	42
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	22
Gambar 4.1	Alokasi Dana Desa Kecamatan Marau Tahun 2019-2024.....	45
Gambar 4.2	Dana Desa Kecamatan Marau Tahun 2019-2024.....	48
Gambar 4.3	Bagi Hasil Pajak Kecamatan Marau Tahun 2019-2024	51
Gambar 4.4	Bagi Hasil Retribusi Kecamatan Marau Tahun 2019-2024	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, upaya ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian, memajukan desa, mengembangkan potensinya, dan meningkatkan demokrasi di tingkat desa (Oktaviana & Darma, 2022). Partisipasi masyarakat desa melalui perencanaan partisipatif merupakan unsur penting dalam kemajuan desa, karena keterlibatan langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan (Menconi dkk., 2017). Namun demikian, otonomi desa tetap diperlukan untuk menjamin kemandirian desa (Kvartiuk & Curtiss, 2019). Selain itu, partisipasi masyarakat meningkat jika mereka diberi kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi (Zachrisson dkk., 2021).

Mayoritas masyarakat Indonesia menetap di wilayah pedesaan karena melimpahnya sumber daya alam dan peluang ekonomi yang besar. (Emylia, 2019). Pembangunan desa menjadi penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Berdasarkan Buku Induk Kode Wilayah Administratif Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, terdapat 74.093 desa dan 8.412 kecamatan di Indonesia (Kemendagri, 2015). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat agar potensi desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Namun, banyaknya jumlah desa juga menjadi salah satu faktor tingginya angka kemiskinan di pedesaan. Oleh karena itu, pengembangan potensi desa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk memantau pembangunan desa, Kementerian Desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang meliputi Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Ketiga indeks tersebut merupakan indikator tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan, yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan desa secara signifikan.

Tabel 1.1
Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Marau Tahun 2023

NAMA DESA	IDM	Ket. IDM
Sukakarya	0.8465	Mandiri
Runjai Jaya	0.8349	Mandiri
Riam Batu Gading	0.8260	Mandiri
Belaban	0.7571	Maju
Karya Baru	0.7256	Maju
Bantan Sari	0.7087	Maju
Pelanjau Jaya	0.7159	Maju
Randai	0.7016	Berkembang
Batu Payung Dua	0.6900	Berkembang
Rangkung	0.7052	Berkembang

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023

Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019–2023 menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan desa di Indonesia. Jumlah Desa Mandiri meningkat tajam, dari 840 desa pada tahun 2019 menjadi 11.456 desa pada tahun 2023, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2021–2023. Pada tahun 2023, Desa Mandiri mencapai 15,4 persen dari total desa. Desa Maju juga meningkat terus, dari 8.647 desa pada tahun 2019 menjadi 23.025 desa pada tahun 2023, atau 31 persen dari total desa. Sebaliknya, jumlah Desa Berkembang menurun, dari 39.866 desa pada tahun 2020 menjadi 28.743 desa pada tahun 2023, meskipun kategori ini masih mencakup 38,6 persen dari total desa, yang merupakan pangsa terbesar.

Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Desa Tertinggal mengalami penurunan dari 17.626 desa pada tahun 2019 menjadi 6.798 desa pada tahun 2023 atau hanya mencakup 9,1 persen dari total desa. Desa Sangat Tertinggal juga mengalami penurunan, meskipun mengalami fluktuasi pada tahun 2021, dari 3.536 desa pada tahun 2019 menjadi 4.382 desa pada tahun 2023 atau 5,9 persen dari total desa.

Secara keseluruhan, data IDM menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan adanya peningkatan jumlah Desa Mandiri dan Maju serta penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam memastikan pemerataan pembangunan bagi desa-desa yang masih tertinggal. Pemerintahan desa sebagai subsistem pemerintahan di Indonesia memiliki

kewenangan, tugas, dan tanggung jawab untuk mengelola kepentingan masyarakatnya (Sengaji & Asyik, 2016).

Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Berdasarkan IDM, desa dikategorikan menjadi lima, yaitu Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal (Pasal 5). Melalui program Pembangunan Desa, pemerintah menargetkan pengurangan 5.000 Desa Tertinggal dan penambahan 2.000 Desa Mandiri, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 (Menteri Desa, 2016). Pengembangan wilayah perdesaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat (Solekhan, 2014).

Kecamatan Marau di Kabupaten Ketapang juga berupaya meningkatkan pembangunan desa melalui program peningkatan IDM. Beberapa desa di Kecamatan Marau masih tergolong Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sehingga memerlukan perhatian khusus dalam hal ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya ini penting untuk mendukung target pemerintah dalam mempercepat pengurangan desa tertinggal dan peningkatan jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

Pada tahun 2023, analisis Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Marau menunjukkan bahwa dari sepuluh desa yang diteliti, tiga desa berstatus Mandiri, empat desa berstatus Maju, dan tiga desa Berkembang. Desa Mandiri, yaitu Sukakarya, Runjai Jaya, dan Riam Batu Gading, memiliki tingkat pembangunan yang tinggi. Desa Maju, seperti Belaban, Karya Baru, Bantan Sari, Pelanjau Jaya, hal tersebut menunjukkan perkembangan positif meskipun masih terdapat potensi untuk perbaikan. Sementara itu, desa Berkembang, yaitu Randai, Batu Payung Dua, dan Rangkung, menghadapi berbagai tantangan, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik, dengan nilai IDM di bawah 0,70. Oktaviana & Darma (2022) berpendapat bahwa peningkatan IDM tidak hanya bergantung pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada faktor-faktor lainnya.

Rendahnya pemberdayaan masyarakat desa dan minimnya kerjasama antar desa juga menjadi permasalahan. Desa Mandiri atau Maju cenderung membangun sendiri tanpa melibatkan Desa Berkembang atau Tertinggal, sehingga potensi gotong royong tidak termanfaatkan yang pada akhirnya memperlambat peningkatan status desa. Tanpa adanya pemberdayaan dan kerjasama yang lebih erat antardesa, kesenjangan pembangunan akan terus terjadi.

Pendapat ini sejalan dengan (Mihai & Iatu, 2020) yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan. Analisis IDM 2023 di Kecamatan Marau menunjukkan bahwa masih terdapat desa Berkembang yang menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama antardesa.

Pengembangan desa menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan desa berasal dari PADesa, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta pendapatan transfer dari pajak dan retribusi daerah. Beberapa desa telah berinovasi dalam pengelolaan APBDesa dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas umum, guna meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagian APBDesa juga dialokasikan untuk sektor pertanian yang merupakan sektor utama dalam perekonomian desa. Dengan pemanfaatan dana yang efektif, desa dapat memperbaiki infrastruktur, menciptakan peluang usaha, dan membangun kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, Dana Desa dan alokasi anggaran yang tepat berperan strategis dalam peningkatan IDM. Kolaborasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dapat mengurangi ketimpangan pembangunan dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Dana Desa tidak hanya difokuskan pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik yang berkeadilan.

Kerjasama antar desa perlu ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan di desa berkembang, sehingga semua desa dapat maju bersama menuju status Mandiri. Alokasi Dana Desa juga berperan penting dalam pembiayaan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat, khususnya di desa berkembang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa kini dipandang bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama sekaligus penggerak dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah memiliki harapan agar seluruh desa di Indonesia dapat berkembang menjadi desa yang mandiri dan produktif. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa, pasal 68 ayat (1) poin c, dijelaskan bahwa tujuan dari ADD adalah:

1. Memperkuat pelaksanaan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
2. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan secara partisipatif sesuai potensi yang dimiliki desa.
3. Memperluas distribusi pendapatan, peluang kerja, dan kesempatan usaha bagi masyarakat di desa.
4. Mendorong tumbuhnya semangat swadaya dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat desa.

Dana tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai kebutuhan kelembagaan, termasuk insentif bagi aparatur desa, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sosial.

Tabel 1.2
Alokasi Dana Desa Kecamatan Marau Tahun 2023

Nama Desa	ADD
Sukakarya	550.415.395
Randai	538.569.580
Belaban	547.695.079
Runjai Jaya	504.477.117
Karya Baru	508.458.165
Riam Batu Gading	528.000.868
Batu Payung Dua	535.894.654
Bantan Sari	532.935.635
Pelanjau Jaya	519.749.336
Rangkung	520.573.805

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Marau, 2023

Tabel 1.2 menunjukkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kecamatan Marau tahun 2023. Total ADD yang diterima seluruh desa di Kecamatan Marau mencapai Rp5.529.600.360, dengan rata-rata masing-masing desa sebesar Rp552.960.036. Desa Sukakarya memperoleh alokasi tertinggi sebesar Rp550.415.395 atau 9,95 persen dari total ADD, yang mencerminkan kebutuhan atau jumlah penduduk yang lebih besar. Desa Belaban berada di posisi kedua dengan alokasi sebesar Rp547.695.079 (9,89 persen dari total ADD).

Sebaliknya, Desa Runjai Jaya memperoleh alokasi terendah sebesar Rp504.477.117 (9,13 persen). Hal ini dapat mencerminkan kebutuhan atau penduduk dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan desa lainnya. Secara umum, sebaran ADD di Kecamatan Marau terlihat cukup merata, yang menunjukkan upaya pemerintah dalam mendistribusikan dana secara adil untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa.

Desa-desa di Kecamatan Marau menerima ADD untuk mendanai proyek-proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Program pemberdayaan masyarakat di daerah ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan peningkatan layanan kesehatan, serta pemberian insentif bagi perangkat desa untuk meningkatkan kinerjanya. Diharapkan program ini dapat diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk memastikan penggunaan ADD yang efektif, penting untuk memetakan kebutuhan masing-masing desa agar alokasi dana sesuai dengan kebutuhan riil. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana juga penting agar masyarakat mengetahui bagaimana penggunaannya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi sangat dianjurkan.

ADD merupakan sumber pendapatan transfer yang signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang berperan penting dalam mendanai pengeluaran pemerintah desa. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak ADD. Studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan akuntabilitas perangkat desa memengaruhi penggunaan ADD (Putra dkk., 2012). Efektivitas ADD menurun apabila masyarakat tidak memahami

kebijakan, terjadi distorsi perilaku, atau pengelolaan dana kurang inovatif (Malik, 2008 dalam Sutikno & Suliswanto (2018).

Pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD secara berkala diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala, serta mengambil langkah yang tepat guna meningkatkan efektivitasnya. Dengan pendekatan yang tepat, ADD diharapkan mampu memberikan dampak yang berarti dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Marau.

Dana Desa diatur berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang menetapkan alokasi sebesar sepuluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dimanfaatkan untuk pengelolaan, pembangunan, pengembangan, serta pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan utama meningkatkan daya saing desa. Sumber anggaran ini berasal dari pendapatan negara dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga semua desa dapat berkembang dan tidak ada yang tertinggal (Nafidah & Suryaningtyas, 2016).

Tabel 1.3
Dana Desa Kecamatan Marau Tahun 2023

Nama Desa	DD
Sukakarya	817.550.000
Randai	1.033.623.000
Belaban	851.804.000
Runjai Jaya	998.180.000
Karya Baru	767.095.000
Riam Batu Gading	824.297.000
Batu Payung Dua	1.005.060.000
Bantan Sari	914.234.000
Pelanjau Jaya	887.525.000
Rangkung	840.795.000

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Marau, 2023

Tabel 1.3 menunjukkan total Dana Desa di Kecamatan Marau sebesar Rp8.120.068.000, dengan alokasi rata-rata per desa sebesar Rp812.006.800. Desa Randai memperoleh alokasi tertinggi sebesar Rp1.033.623.000, sedangkan Desa Karya Baru memperoleh alokasi terendah sebesar Rp767.095.000.

Data ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam alokasi Dana Desa di setiap desa. Beberapa desa, seperti Randai dan Batu Payung Dua, memperoleh alokasi yang lebih besar, yang mengindikasikan adanya fokus pada pembangunan infrastruktur atau program tertentu. Desa dengan alokasi yang lebih kecil perlu mendapat perhatian agar infrastruktur dan layanan publik dapat ditingkatkan. Setiap desa harus memastikan bahwa penggunaan Dana Desa transparan dan akuntabel. Pelatihan manajemen keuangan dan proyek bagi perangkat desa penting dilakukan. Dengan pengelolaan yang efektif, Dana Desa di Kecamatan Marau dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa yang baik membantu mengatasi tantangan seperti kurangnya infrastruktur, layanan publik, dan pendidikan di desa-desa yang sedang berkembang. Penyaluran yang tepat akan memperkuat kolaborasi antara Desa Mandiri, Maju, Berkembang, dan Tertinggal, sehingga desa yang lebih maju dapat membantu desa tertinggal. Hal ini akan menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Perbedaan alokasi Dana Desa di Kecamatan Marau menunjukkan perlunya pendekatan yang berbeda untuk mencapai pembangunan yang berimbang. Desa Randai dengan alokasi tertinggi dapat menjadi contoh pengelolaan Dana Desa yang efektif. Sebaliknya, desa dengan alokasi yang lebih rendah, seperti Karya Baru, membutuhkan lebih banyak dukungan untuk mengoptimalkan potensinya. Kolaborasi antardesa memungkinkan terjadinya berbagi pengalaman dan kerja sama, sehingga semua desa dapat menikmati hasil pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan pengelolaan dana yang tepat, tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan status desa dapat tercapai. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kerja sama antardesa, yang didukung oleh alokasi dana yang tepat, membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa di Kecamatan Marau, sebagaimana disorot dalam analisis IDM 2023.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah/Kota merupakan sumber pendapatan penting bagi desa, dengan alokasi minimal 10% dari pajak dan retribusi untuk mendukung Dana Desa (DD), yang juga mendapat paling sedikit 10% dari dana perimbangan dalam APBD. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah

pusat dan daerah dalam mendukung tata kelola desa untuk meningkatkan infrastruktur sosial, layanan dasar, dan memberdayakan masyarakat desa.

Tabel 1.4
Bagi Hasil Pajak-Bagi Hasil Retribusi Desa Kecamatan Marau Tahun 2023

Nama Desa	BHP	BHR
Sukakarya	23.854.421	449.310
Randai	18.951.451	449.310
Belaban	21.339.707	449.310
Runjai Jaya	20.513.777	449.310
Karya Baru	19.355.332	449.310
Riam Batu Gading	22.339.953	449.310
Batu Payung Dua	19.016.836	449.310
Bantan Sari	39.165.710	449.310
Pelanjau Jaya	20.148.003	449.310
Rangkung	19.063.077	449.310

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Marau, 2023

Tabel 1.4 menunjukkan hasil penerimaan pajak dan retribusi desa di Kecamatan Marau tahun 2023 dengan total BHP-BHR sebesar 248.032.556. Angka ini menggambarkan kontribusi pajak dari masing-masing desa, yang menunjukkan betapa pentingnya peran desa dalam mendukung perekonomian daerah. Rata-rata BHP-BHR per desa sebesar 24.803.256, memberikan gambaran penerimaan Bagi Hasil Pajak-Bagi Hasil Retribusi per desa.

Desa dengan BHP-BHR tertinggi adalah Desa Bantan Sari sebesar 39.615.020. Keberhasilan ini kemungkinan dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam, pengelolaan yang efektif, dan kebijakan perpajakan yang mendukung. Sebaliknya, Desa Randai memiliki BHP-BHR terendah yaitu 19.400.761, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, atau faktor lainnya.

Terdapat perbedaan mencolok dalam penyaluran BHP-BHR antar desa, Desa Bantan Sari jauh lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Ketimpangan ini dapat menimbulkan kesenjangan aspek ekonomi yang harus menjadi fokus utama para pembuat kebijakan. Pemerintah Kecamatan Marau perlu melakukan evaluasi dan perencanaan langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan pendapatan, termasuk program peningkatan kapasitas pemungutan pajak di desa dengan BHP-BHR rendah.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peran pajak juga penting dilakukan agar mereka lebih berperan aktif dalam pembangunan daerah. Menurut Solekhan (2014), pembangunan desa harus mampu meningkatkan mutu layanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi. Program desa atau rekomendasi Kementerian Desa dapat mendorong desa menuju status Desa Mandiri. Desa-desanya di Kecamatan Marau telah menunjukkan bahwa permasalahan pembangunan dapat diatasi dengan cepat (Aliyani, 2022)

Kemandirian desa lebih ditekankan dibandingkan otonomi desa, karena otonomi sering dianggap sekadar sebagai wilayah administrasi tingkat ketiga setelah provinsi dan kabupaten/kota. Kemandirian desa mengarah pada pembangunan yang berbasis pada aset dan potensi lokal. Kemandirian ini tidak berarti desa dapat berjalan tanpa dukungan politik, namun juga tidak bergantung sepenuhnya pada instruksi pemerintah. Dengan status hukum yang baru, desa didorong untuk mencapai kemandirian sesuai dengan semangat tersebut. Sebagai bukti keberhasilannya, semakin banyak desa yang menerima transfer dana dari pemerintah pusat, berupa Dana Desa (DD), bantuan provinsi, serta Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa), sehingga berimplikasi pada perubahan struktur dan model Anggaran Desa.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pelaksanaan Undang-Undang Desa yang sedang berlangsung saat ini, peneliti merasa terdorong untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap isu-isu yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini penting untuk memahami dampak dari alokasi dana desa serta kontribusi berbagai sumber pendapatan desa. Dengan demikian, judul yang diusulkan dalam penelitian ini adalah "**Pengaruh Transfer Keuangan Terhadap Pembangunan Desa Di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang**".

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Indeks Desa Membangun (IDM) berfungsi sebagai salah satu ukuran utama untuk mengevaluasi sejauh mana sebuah desa dapat berkembang dalam aspek

pembangunan dan pemerataan, yang pada akhirnya mencerminkan keadilan sosial di dalam masyarakat. Namun, kenyataannya, banyak desa masih menghadapi berbagai rintangan dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang tersedia, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa, Dana Desa itu sendiri, serta hasil dari pajak dan retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh mengenai dampak alokasi Dana Desa dan berbagai sumber pendapatan tersebut terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Dengan memahami hubungan antara alokasi dana dan kemajuan desa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi yang efektif untuk pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta efisiensi dalam penggunaan dana untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah Alokasi Dana Desa mempengaruhi Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang?
2. Apakah Dana Desa mempengaruhi Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang?
3. Apakah Bagi Hasil Retribusi mempengaruhi Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang?
4. Apakah Bagi Hasil Retribusi mempengaruhi Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah diperolehnya informasi yang akurat dan terukur terkait dengan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Bagi Hasil Pajak terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Bagi Hasil Retribusi terhadap Indeks Desa Membangun di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi atau studi empiris bagi penelitian selanjutnya dalam bidang pembangunan desa, terutama yang berkaitan dengan alokasi dana desa, dana desa, serta bagi hasil pajak dan retribusi yang mempengaruhi hal tersebut.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam rangka menentukan langkah kebijakan terkait alokasi dana desa, dana desa maupun bagi hasil pajak-bagi hasil Retribusi dalam rangka mendorong meningkatnya indeks desa membangun yang akhirnya peningkatan pembangun di desa.